



KEYNOTE SPEECH
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PADA
ACARA SEMINAR NASIONAL KELAUTAN XIV
(SEMINAKEL XIV)

**“Sinergi Para Pemangku Kepentingan dalam
Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan
sebagai Tulang Punggung Perekonomian Bangsa
Secara Berkelanjutan”**

UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
Surabaya, 11 Juli 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati:

1. Dr. Ir. Sudirman, S.IP, S.E., M.A.P., Rektor Universitas Universitas Hang Tuah Surabaya;
2. Prof. Dr. Ir. Soeprapto, DEA, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII;
3. Didik Sasono, Setyadi, S.H., M.H., Kepala Divisi Formalitas SKK Migas sekaligus pemerhati kebijakan publik sektor kemaritiman dan sumber daya alam;
4. Dr. Dian Mulawarmanti, drg, M.S., peneliti manfaat sumber day alaut FKG Univesitas Hang Tuah;
5. Para akademisi, peneliti, praktisi, dan inovator bidang kelautan dan perikanan yang hadir pada seminar nasional ini; serta
6. Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kasih dan sayang-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya untuk mengikuti acara ***Seminar Nasional Kelautan XIV Tahun 2019.***

Saya sangat mengapresiasi inisiatif Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan UHT beserta pihak-pihak lain yang terlibat

yang telah melaksanakan Seminar Nasional ini. Terlebih tema yang diangkat adalah “Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia.”

Tema ini saya kira sangat selaras dengan fokus pembangunan pemerintah kita saat ini. Jika pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) III tahun 2015-2019 pembangunan banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa, maka pada RPJM IV 2020-2024 titik berat lainnya adalah sumber daya manusia dan daya saing sehingga peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan menjadi semakin berkualitas.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Seiring dengan itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sekali berbicara dengan mengangkat tema “Sinergi Para Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Tulang Punggung Perekonomian Bangsa Secara Berkelanjutan”.

Ada tiga kata atau frasa kunci dari tema ini. ***Pertama***, sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. ***Kedua***, berkelanjutan. ***Ketiga***, sinergi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan

kedua kata/frasa kunci sebelumnya. Mari kita diskusikan satu-satu.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Kesadaran kita tentang pentingnya sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung kehidupan negara kepulauan seperti Indonesia sudah lama terpatri dalam benak para pendiri bangsa. Dalam salah satu pidatonya yang menggelora di tahun 1953, Bung Karno pernah mengatakan: “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali! Bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya.” Seluas-luasnya artinya dalam berbagai sektor yang ada di laut dan perairan Indonesia.

Ajakan Bung Karno tersebut tentu sangat beralasan. Seperti kita ketahui, tiga perempat wilayah Indonesia adalah perairan dengan mengandung potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam. Di samping itu, industri kelautan dan perikanan menciptakan “*backward and forward – linkage industries*” yang tinggi serta sebagian besar sumber dayanya berkategori sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*).

Untuk sumber daya yang tak dapat pulih (*non-renewable resources*) kita memiliki minyak dan gas bumi serta bahan tambang dan mineral lainnya, yang kontribusinya akan semakin menurun seiring semakin menipisnya cadangan di perut bumi.

Sementara untuk sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*), kita memiliki sumber daya ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Ini sumber daya luar biasa yang dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi luar biasa dan berkelanjutan jika kita bisa mengelolanya secara bertanggung jawab.

Di samping itu, laut juga menyimpan potensi energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, angin, dan lain-lain, juga potensi sektor jasa seperti transportasi, komunikasi, wisata bahari, dan lain-lain. Oleh karena itu, tentu sangat naif apabila negeri perairan seperti Indonesia, potensi kelautan dan perikananannya tidak dikelola dengan optimal.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Dengan visinya yang luar biasa, pada tahun 1999 Presiden Indonesia keempat, Bapak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendirikan departemen khusus yang menangani kelautan, yaitu Departemen Eksplorasi Laut. Dalam berkembangannya, departemen tersebut bermetamorfosis menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hadirnya kementerian khusus yang menangani kelautan dan perikanan menjadi tonggak sejarah, yang

menunjukkan betapa bahwa sektor ini menyimpan potensi yang sangat besar dan wajib ditangani secara spesifik dan sungguh-sungguh.

Visi besar Bung Karno dan Gus Dur terus berlanjut. Pada periode pemerintahan terbaru yaitu RPJM III 2015-2018 di bawah Bapak Presiden Joko Widodo, semangat kemaritiman semakin bergelora. Pada Pidato Kenegaraan tanggal 20 Oktober 2014 beliau mengatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Beliau juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjabarkan dengan sangat nyata arahan Bapak Presiden melalui 3 (tiga) pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Melalui pilar-pilar tersebut, Ibu Menteri tidak hanya melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang sifatnya fisik, tetapi juga yang tak kalah penting adalah melakukan perbaikan dan reformasi tata kelola. Ini menjadikan perikanan tangkap diperbaiki dari semua sisi secara holistik. Dan ini pula yang langsung bersetuhan dengan kata kunci kedua dalam diskusi kita kali ini yaitu: **berkelanjutan.**

Ibu Menteri dan kita semua sadar bahwa sumber daya yang dapat diperbaharui tetap tidak tak terbatas jika kita tidak mengelolanya dengan bijaksana. Oleh karena itu, dilakukan berbagai terobosan agar pengelolaan yang tidak hati-hati berubah menjadi pengelolaan yang berkelanjutan, IUU (*illegal, unreported, and unregulated*) fishing berubah menjadi LRR (*legal, reported, and regulated*) fishing, serta sumber daya ikan yang dulu dijarah asing menjadi sumber daya ikan yang sepenuhnya untuk nelayan Indonesia.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Banyak langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan. Secara lebih spesifik saya ingin menyampaikan beberapa langkah penting terkait sub sektor perikanan tangkap.

Dari sisi **kedaulatan**, salah satu yang gencar kita lakukan adalah reformasi tata kelola perizinan usaha penangkapan ikan. Reformasi tata kelola perizinan ini merupakan salah satu wujud nyata untuk mengubah perikanan tangkap yang masih diwarnai IUU *fishing* menjadi LLR *fishing*.

Salah satu bentuk nyata reformasi tata kelola perizinan adalah dilakukannya reuiu dan asistensi perizinan kepada pelaku usaha perikanan pemilik kapal perikanan

berukuran di atas 30 GT. Dari hasil reviu dan asistensi tersebut terbukti banyak sekali pelaku usaha nakal yang tidak melaporkan LKU (Laporan Kegiatan Usaha)/LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) sesuai dengan angka yang sebenarnya. Bahkan ada angka yang sebenarnya sampai 5-6 kali lipat dari angka yang dilaporkan.

Dari hasil reviu sampai saat ini, selisih produksi pada LKU/LKP tahun 2017-2018 sebelum dan setelah reviu terdapat selisih sebesar 1.177.978,85 ton atau apabila dirupiahkan sekitar Rp 35,3 triliun dengan asumsi harga ikan rata-rata Rp 30.000 per kilogram. Angka ini diperoleh dari jumlah kapal yang direviu tahun 2017 sebanyak 4.984 unit dan tahun 2018 sebanyak 4.889 unit. Tentu ini angka yang tidak sedikit. Potensi pajak dari selisih dimaksud bisa mencapai Rp 5 triliun.

Berbagai ketidaktaatan ini tentunya berdampak banyak. Data statistik kita menjadi terganggu, ketaatan terhadap pajak menjadi tidak akurat, dan masih banyak lagi. Ini yang harus terus kita benahi bersama. Para pelaku usaha wajib taat dan disiplin terhadap kewajiban-kewajibannya.

Banyak kegiatan lainnya terkait reformasi tata kelola perizinan. Salah satu langkahnya adalah layanan perizinan e services melalui laman perizinan.kkp.go.id, pelayanan perizinan satu pintu di kantor KKP, penertiban terhadap kapal *markdown* dan pelaksanaan gerai

perizinan, serta pengembangan Sistem Aplikasi Kapal Daerah (SIMKADA) untuk perizinan kapal berukuran di bawah 30 GT.

Selain itu, Indonesia terus berperan aktif dalam organisasi perikanan regional (RFMO) seperti IOTC, CCSBT, WCPFC dan IATTC untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya ikan yang beruaya jauh seperti tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

Selama 5 tahun terakhir (2014-2018) rata-rata produksi tuna Indonesia secara keseluruhan mencapai 689.513 ton. Indonesia juga berhasil terus mempertahankan posisinya sebagai Penghasil Tuna Terbesar di Dunia.

Tidak hanya dari sisi produksi saja yang kita genjot, tetapi juga dari sisi peningkatan persyaratan pasar internasional juga kita akselerasikan. Hasilnya, pada tahun 2018 untuk pertama kalinya produk tuna Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dalam bentuk Sertifikat *MSC Eco-Label* kepada Perusahaan PT Citra Raja Ampat. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan tuna di Indonesia sudah diakui pengelolaannya secara internasional dapat memenuhi prinsip-prinsip yang berkelanjutan yang telah ditetapkan di tingkat regional (RFMOs) maupun internasional.

Sudah ada 9 perusahaan lagi yang saat ini dalam proses untuk mendapatkan pengakuan serupa. Di samping itu, melalui *fair trade*, produk perikanan tuna yang dihasilkan oleh para nelayan skala kecil, antar lain nelayan di Pulau Seram, sudah mampu menembus pasar AS.

Selama tiga tahun berturut-turut tingkat kepatuhan Indonesia di IOTC meningkat dari 64% (2016), 73% (2017) dan 77% (2018), sedangkan di WCPFC meningkat dari 61% (2016) menjadi 81% (2017). Peningkatan ini merupakan upaya keras KKP untuk mematuhi resolusi yang tertuang dalam *Conservation and Management Measures* pada semua jenis komoditi tuna. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Tuna Indonesia semakin taat hukum dalam melaporkan hasil tangkapan.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati.

Untuk pilar **keberlanjutan**, Ditjen Perikanan Tangkap mengawal pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan seperti usaha penangkapan ikan hanya untuk 100% PMDN (Peraturan Presiden No. 44/2016), moratorium Izin kapal ikan eks asing (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014), larangan alih muatan di tengah laut untuk ke luar negeri (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.57/2014), larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur (Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan No. 1/2015 dan 56/2016), larangan penggunaan pukat tarik dan pukat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 dan 71/2016), serta Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 75 s.d. 84/2016).

Mendukung pilar keberlanjutan lainnya Ditjen Perikanan Tangkap terus berupaya meningkatkan peran Lembaga Pengelola WPP, melakukan penyempurnaan pendataan dan pemantauan melalui penerapan *e-log book* penangkapan ikan, pelaksanaan observer di atas kapal perikanan, dan lain-lain.

Terkait dengan *log book* penangkapan ikan, dulu pembuatannya dilakukan secara manual oleh nakhoda sehingga tidak praktis dan dianggap rumit. Sejak tahun 2018, Ditjen Perikanan Tangkap menginisiasi pembuatan dan pemberlakuan *e-log book* dan mendapat sambutan hangat dari para pelaku usaha.

E-logbook penangkapan ikan berbasis aplikasi handphone sehingga prosesnya menjadi sangat mudah, dengan data yang lebih akurat dan pelaporan yang lebih real time. Kini sebanyak 5.356 kapal telah melaksanakan *e-log book* penangkapan ikan.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati.

Pada pilar **kesejahteraan**, berbagai langkah juga dilakukan dari mulai bantuan premi asuransi nelayan, bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, fasilitasi permodalan nelayan termasuk mendirikan BLU LPMU KP (Badan Layanan Umum - Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), dan lain-lain.

Terkait dengan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN), baru pada periode ini hal itu diberikan, tepatnya mulai tahun 1996. Hal ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada kurun 2016-2018 telah disalurkan BPAN untuk 1.048.117 nelayan dan tahun 2019 ditargetkan tersalurkan BPAN bagi 150.000 nelayan.

Terkait dengan bantuan kapal perikanan, program ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi nelayan dan mempermudah akses nelayan untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Alasan lainnya, bantuan kapal perikanan dimaksudkan untuk menggantikan kapal-kapal eks asing yang dulu beroperasi di perairan Indonesia dan kini sudah tidak ada lagi.

Realisasi program bantuan kapal tahun 2015-2018 sebanyak 2.215 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran yang didistribusikan kepada nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2019 ini bantuan kapal perikanan diharapkan bertambah 300 unit.

Dampak dari program tersebut yaitu adanya peningkatan pendapatan sampai dengan 100-200% karena jangkauan melaut yang lebih luas dan hasil tangkapan lebih banyak. Dampak lain juga dirasakan di sektor industri galangan kapal ikan kecil-menengah yang mulai tumbuh serta penyerapan tenaga kerja di bidang perkapalan yang terus meningkat.

Selanjutnya, terkait dengan bantuan alat penangkapan ikan (API) ramah lingkungan, pada periode 2015-2018 telah didistribusikan bantuan API ramah lingkungan sebanyak 16.124 paket. Distribusi paket bantuan alat penangkapan ikan secara umum dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 7.103 paket untuk bantuan regular dan 9.021 paket dalam rangka mendukung pelaksanaan program penggantian API yang dilarang (seperti cantrang) dengan API ramah lingkungan.

Program penggantian dimaksud sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016. Tujuan akhir dari pemberian bantuan API ramah lingkungan tentu saja adalah

memberdayakan masyarakat nelayan sehingga meningkat kesejahterannya serta sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Program lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan adalah permodalan. Terkait permodalan ini, pada tahun 2016 pula tercatat sejarah baru dengan berdirinya lembaga yang secara khusus mengelola dan menyalurkan permodalan usaha sektor kelautan dan perikanan yaitu BLU LPMUKP. Sampai saat ini, penyaluran kredit melalui dana bergulir BLU LPMUKP sektor perikanan tangkap sebesar Rp 138 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 10.062 nelayan.

Bantuan permodalan juga dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan melalui Kredit usaha rakyat (KUR) serta bentuk kemitraan / perjanjian kerja sama usaha. Selain itu, dilakukan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan. Program ini selain untuk menjamin kepastian kepemilikan aset nelayan, juga pada tahap selanjutnya sertifikat tersebut dapat dijadikan agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan usaha. Pada periode 2015-2018 sebanyak 76.556 sertipikat yang telah diserahkan kepada nelayan.

Dalam mendukung pilar kesejahteraan serta terus menumbuhkan ekonomi kelautan dan perikanan, KKP juga melakukan berbagai kegiatan lainnya seperti pengembangan pelabuhan perikanan termasuk

mendirikan TPI higienis, pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan lain-lain.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati.

Dari kebijakan dan langkah yang telah dilaksanakan, dampaknya menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan.

Pertama, potensi sumber daya ikan di laut melonjak dari semula 6,52 juta ton di tahun 2011 menjadi 12,54 juta ton di tahun 2017.

Hal ini juga dibarengi dengan volume produksi perikanan tangkap juga terus mengalami lonjakan. Di tahun 2015 produksi kita mencapai 6,67 juta ton sedangkan di tahun 2018 sudah mencapai 7,3 juta ton atau meningkat rata-rata hampir 3% per tahun.

Yang lebih menarik justru dari sisi nilai produksi. Angka kenaikannya menunjukkan akselerasi yang jauh lebih signifikan. Jika pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 120,6 triliun, maka pada tahun 2018 sudah mencapai Rp 210,7 triliun, atau meningkat rata-rata 23,20% per tahun.

Ini sungguh raihan yang tidak main-main. Angka ini juga menjadi salah satu petunjuk bahwa upaya kita untuk menjaga mutu ikan hasil tangkapan dari mulai bantuan

kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, penerapan CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik), pembangunan dan operasionalisasi TPI higienis di pelabuhan perikanan, dan lain-lain, menunjukkan hasil yang baik.

Kedua, indikator kesejahteraan nelayan juga terus mengalami peningkatan. Kenaikan nilai jual ikan yang luar biasa, berjalan seiring dengan kenaikan indikator yang terkait dengan kesejahteraan seperti nilai tukar nelayan (NTN) dan pendapatan nelayan.

Jika pada tahun 2015 NTN masih di angka 106,14 pada tahun 2018 melesat menjadi 113,28. Selanjutnya, jika pada tahun 2015 rata-rata pendapatan nelayan kita hanya sebesar Rp 1,95 juta per orang, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 3,64 juta per orang per bulan atau meningkat rata-rata sebesar 25,41% per tahun. Demikian pula dengan pendapatan RTP, meningkat rata-rata 19,58% per tahun pada kurun 2015-2018.

Kedua, kontribusi sektor perikanan bagi perekonomian juga semakin melesat. Penerimaan pajak dari sektor perikanan di tahun 2014 masih Rp 851 milyar dengan kontribusi terhadap total pajak 0,07%. Pada tahun 2018 angka itu sudah jauh lebih baik dengan angka Rp 1,55 triliun dengan nilai kontribusi terhadap total pajak sebesar 0,12%.

Dari sisi pertumbuhan PDB pun terus mengalami peningkatan. Nilai DPB perikanan meningkat rata-rata 5,4% per tahun dalam periode 2015-2018.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), PNBP sektor perikanan terus mengalami trend peningkatan. Di tahun 2014 total PNBP sektor perikanan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan baik PNBP SDA maupun non SDA jumlahnya sebesar Rp 267 milyar. Selanjutnya pada tahun 2018 menjadi Rp 647 milyar.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Capaian yang telah diraih pada RPJM III 2015-2019 tentunya harus dipertahankan dan terus ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya yaitu RPJM IV 2020-2024. Bagaimana cara melakukannya?

Di sinilah pentingnya kata/frasa kunci ketiga dari diskusi kita kali ini yaitu: **sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholders*)**.

Kita sadari bersama bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak mungkin maju dan berkembang secara berkelanjutan tanpa kerja sama yang sinergis di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanyalah salah satu aktor pembangunan yang kinerja

pembangunannya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Selama ini, kerja sama itu sudah terjalin dengan baik, dan kita harapkan akan semakin meningkat pada periode pembangunan selanjutnya.

Dari nelayan dan para pelaku usaha perikanan, kita harapkan dukungannya untuk semakin berusaha secara efektif dan efisien serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usaha penangkapan ikan.

Dari LSM, asosiasi, organisasi profesi dan lain-lain juga perannya sangat penting untuk terus memberikan sumbangsuhnya. Inisiatif yang dilakukan oleh Iskindo (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia) dengan ragam kegiatannya seperti Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa, merupakan salah satu contoh sinergitas membangun sektor kemaritiman di tanah air. Melalui ekspedisi semacam ini dapat dilaksanakan berbagai langkah seperti sosialisasi dan pemberdayaan nelayan, kampanye lingkungan, pengembangan riset-riset kelautan, dan lain-lain. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti ini, dari semua pihak, perlu kita dukung dan terus gelorakan.

Dari lingkungan perguruan tinggi, peneliti, atau akademisi, dukungan atau sinergitas juga teramat

penting. Dari sisi ini, riset-riset untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat strategis, misalnya saja: pengembangan alternatif alat atau cara penangkapan ikan ramah lingkungan, pengembangan energi alternatif untuk kapal-kapal perikanan yang lebih berkelanjutan, pengembangan pelabuhan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan lain-lain.

Demikian pula dengan *stakeholder* lainnya seperti lembaga permodalan, aparat penegak hukum di laut, dan lain-lain peran dan sinerginya semakin luar biasa. Dukungan yang semakin meningkat diharapkan semakin memajukan sektor kelautan dan perikanan kita.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan peneliti yang hadir, agar selalu semangat dan semakin bersinergi, termasuk untuk menemukan hal-hal baru untuk kepentingan bangsa kita. Saya juga berharap kerja sama dan sinergi antara pemerintah dengan saudara-saudara sekalian dapat terus berjalan dengan lancar dan harmonis, sehingga pemerintah dapat lebih baik lagi dalam mengambil kebijakan khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati.

Terakhir perlu saya sampaikan, *concern* Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Indonesia Darurat

Sampah Plastik di Laut sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Permasalahan sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut (*marine debris*) semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan saat ini 8 juta metric ton per tahun sampah yang masuk ke laut, dan kurang lebih 1,29 juta metric ton diperkirakan berasal dari Indonesia, sehingga Indonesia dianggap menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, setelah China.

Sampah plastik mengalami proses pelapukan mulai dari makro plastic, ke mikro dan nano plastic, yang melalui proses panjang sampai dengan 500 tahun. Dalam proses tersebut, sampah plastik dapat merusak ekosistem pesisir, masuk ke dalam jaringan makanan ikan dan biota laut sehingga banyak biota laut yang pada akhirnya memakan plastik/mikroplastik yang menyebabkan gangguan pencernaan bahkan kematian. Diperkirakan, dampak akumulasi mikroplastik di jaringan makanan tersebut dapat masuk ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya.

Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%, pengelolaan 70% sampah, serta pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% sampai 2025. Komitmen ini disampaikan

Presiden Indonesia dalam acara *Our Ocean Conference* 2018 di Bali, Oktober 2018 lalu. Oleh karena itu, langkah-langkah operasional pengurangan sampah plastik di laut seperti: *re-think, refuse*, dan *3r (reduce, reuse, recycle)* harus kita sukseskan bersama.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah hadir juga kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara yang sangat penting dan baik ini.

Selamat melaksanakan Seminar Nasional Kelautan XIV. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan menjadikan acara ini sebagai ladang ibadah dan berkontribusi untuk pembangunan kelautan dan perikanan di tanah air. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 11 Juli 2019
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Ttd.
M. Zulficar Mochtar